

SAKALIMA

PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN
VOL 3. NO. 2 (2026)

ISSN: 3064-2361

Rekonstruksi Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal PTKI Berbasis *Total Quality Management* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Merita Diana✉, Subandi✉, Deden Makbuloh✉, dan Ahmad Fauzan✉

To cite this article Diana, M., Subandi, Makbuloh, D., Fauzan, A. Rekonstruksi Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal PTKI Berbasis *Total Quality Management* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. *SAKALIMA Pilar Pemberdaya. Masy. Pendidik.*, vol. 3, no. 2, pp. 414–427, 2026. <https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i2.505>

To link to this article:



Published online: June. 23, 2026



Submit your article to this journal



View crossmark data

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
<https://journal.wiseedu.co.id/index.php/sakalima/about>



Rekonstruksi Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal PTKI Berbasis *Total Quality Management* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Merita Diana, Subandi, Deden Makbuloh, Ahmad Fauzan

Received: 12 Maret 2026

Revised: 26 Mei 2026

Accepted: 13 Juni 2026

Online: 23 Juni 2026

Abstract

External quality assurance in Islamic higher education requires an evaluation model that moves beyond administrative compliance toward continuous improvement, ethical governance, and value-based institutional transformation. This study aims to reconstruct the evaluation of the External Quality Assurance System for Islamic Higher Education Institutions through the integration of Total Quality Management and *maqāṣid al-syarī'ah*. The study employed qualitative document analysis and literature review. The corpus consisted of 31 key sources comprising national quality assurance regulations, accreditation instruments, Islamic higher education quality assurance guidelines, foundational theories, and scholarly literature on quality assurance, quality culture, Total Quality Management, accreditation, digital quality assurance, and *maqāṣid al-syarī'ah* published or used within the 1986–2026 range. Data were analysed using thematic synthesis, theoretical comparison, and source triangulation. The findings reveal four major themes: the shift toward outcome-based and evidence-based accreditation, the persistence of compliance-oriented practices, the gap between formal quality systems and institutional quality culture, and the relevance of *maqāṣid al-syarī'ah* as an ethical framework for reconstructing accreditation. The integration of Total Quality Management strengthens the logic of continuous improvement, while *maqāṣid al-syarī'ah* reframes accreditation as a mechanism to protect religion, intellect, life, property, and future generations. This study contributes a value-based continuous improvement framework for reconstructing external quality assurance in Islamic higher education.

Keywords: Accreditation; External Quality Assurance; Islamic Higher Education; Maqāṣid al-Sharī'ah; Total Quality Management

Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright:

©

2026 by the author(s).

License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

VOL 3 NO 2 2026 F-ISSN 3004-9361


SAKALIMA
PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN



PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan tinggi mengalami pergeseran mendasar dari mekanisme inspeksi administratif menuju evaluasi berbasis capaian, bukti, dan peningkatan berkelanjutan. Dalam agenda mutu internasional, *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* menempatkan penjaminan mutu sebagai proses internal dan eksternal yang harus berkontribusi pada kepercayaan publik, peningkatan pembelajaran, dan akuntabilitas kelembagaan [1]. Pergeseran tersebut memperluas makna mutu dari sekadar kepatuhan terhadap standar menjadi kemampuan institusi untuk menunjukkan relevansi, efektivitas, dan transformasi layanan akademik. Dengan demikian, akreditasi tidak lagi memadai apabila dipahami hanya sebagai mekanisme kontrol periodik; akreditasi perlu dibaca sebagai instrumen pembelajaran organisasi yang menghubungkan standar, data, refleksi, dan perbaikan sistemik.

Dalam literatur mutu pendidikan tinggi, mutu dipahami sebagai konsep multidimensional. Harvey dan Green menempatkan mutu sebagai pengecualian, kesempurnaan, kesesuaian tujuan, nilai tambah, dan transformasi [2]. Stensaker menegaskan bahwa hasil penjaminan mutu tidak dapat dipisahkan dari asumsi kelembagaan tentang perubahan organisasi, sebab sistem eksternal hanya efektif apabila mampu memengaruhi perilaku internal institusi [3]. Elassy juga menunjukkan bahwa *quality assurance* dan *quality enhancement* memiliki orientasi berbeda: yang pertama cenderung menekankan jaminan kepatuhan, sedangkan yang kedua menuntut peningkatan mutu secara substantif [4]. Dalam kerangka ini, persoalan utama bukan semata ada atau tidaknya instrumen akreditasi, melainkan sejauh mana instrumen tersebut mendorong perubahan budaya, tata kelola, dan kinerja akademik secara berkelanjutan.

Kesenjangan antara sistem dan budaya mutu menjadi perhatian penting dalam kajian penjaminan mutu. Bendermacher dkk. menunjukkan bahwa *quality culture* terbentuk ketika struktur formal, kepemimpinan, komunikasi, partisipasi sivitas akademika, dan nilai kolektif bekerja secara terpadu [5]. Leiber, Stensaker, dan Harvey menambahkan bahwa evaluasi dampak penjaminan mutu harus menjembatani teori dan praktik, karena efektivitas sistem mutu tidak cukup dinilai dari keberadaan prosedur, tetapi dari perubahan yang dapat ditelusuri pada pengambilan keputusan, pembelajaran institusional, dan perbaikan layanan [6]. Dengan demikian, sistem penjaminan mutu eksternal perlu dihubungkan secara erat dengan sistem penjaminan mutu internal agar hasil akreditasi tidak berhenti pada dokumen, tetapi menjadi dasar perencanaan strategis dan peningkatan mutu.

Perspektif *Total Quality Management* memberikan basis teoritis untuk membaca kebutuhan tersebut. Sallis memandang TQM dalam pendidikan sebagai pendekatan kelembagaan yang menempatkan kepemimpinan, orientasi pemangku kepentingan, keterlibatan seluruh unsur organisasi, dan perbaikan berkelanjutan sebagai inti manajemen mutu [7]. Deming menolak ketergantungan berlebihan pada inspeksi akhir dan menekankan siklus *Plan, Do, Check, Act* sebagai mekanisme pembelajaran organisasi [8]. Juran melalui trilogi mutu menegaskan pentingnya *quality planning*, *quality control*, dan *quality improvement* secara terpadu [9]. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada akreditasi, maka SPME seharusnya tidak hanya mengukur kelayakan minimal, tetapi juga mendorong institusi untuk mengembangkan sistem mutu yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi keunggulan.

Dalam konteks Indonesia, SPME Dikti dilaksanakan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan lembaga akreditasi mandiri. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 mengarahkan evaluasi pada sembilan kriteria yang mencakup visi, misi, tata pamong, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan dan sarana, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta luaran dan capaian tridharma [10]. Perkembangan regulasi terbaru menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan, dengan pengaturan mengenai standar nasional, standar perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu, lembaga akreditasi, dan pangkalan data pendidikan [11]. Artinya, integrasi SPMI dan SPME merupakan syarat kelembagaan agar akreditasi berjalan sebagai proses peningkatan, bukan sebagai aktivitas administratif menjelang asesmen. Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, persoalan mutu memiliki dimensi tambahan. PTKI tidak hanya berkewajiban memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga memelihara mandat keilmuan, moral, dan sosial keislaman. Pedoman penjaminan mutu internal PTKI menempatkan sistem mutu sebagai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang relevan dengan karakter kelembagaan Islam [12]. Oleh karena itu, evaluasi eksternal PTKI perlu dikaitkan dengan nilai amanah, ihsan, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Tanpa integrasi nilai, akreditasi berisiko menjadi ritual birokratis yang memperbanyak dokumen, tetapi tidak selalu memperkuat integritas akademik dan dampak sosial lembaga.

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka filosofis untuk menghubungkan mutu akademik dengan tujuan normatif pendidikan Islam. Al-Ghazālī dan Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa kemaslahatan bertumpu pada pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau generasi [13], [14]. Auda mengembangkan *maqāṣid* sebagai pendekatan sistem yang menekankan keterbukaan, multidimensionalitas, kebermaksudan, dan perbaikan berkelanjutan [15]. Dalam konteks akreditasi PTKI, *hiḏ al-dīn* dapat terkait dengan integritas kelembagaan dan tata nilai, *hiḏ al-'aql* dengan kurikulum dan penelitian, *hiḏ al-naḑs* dengan lingkungan kampus yang aman, *hiḏ al-māl* dengan tata kelola keuangan, dan *hiḏ al-naṑl* dengan mutu lulusan serta keberlanjutan generasi.

Kajian tentang akreditasi dan penjaminan mutu telah berkembang luas, tetapi arahnya masih tersebar dalam beberapa rumpun. Rosa dan Amaral menunjukkan bahwa penjaminan mutu kontemporer menuntut keseimbangan antara akuntabilitas eksternal dan peningkatan internal [16]. Kumar dkk. menemukan bahwa akreditasi berperan penting dalam pencapaian mutu pendidikan dan SDG 4, tetapi penelitian lanjutan masih diperlukan untuk menjelaskan dampak akreditasi, hubungan akreditasi dengan *quality assurance*, serta mekanisme peningkatan mutu yang benar-benar bekerja di tingkat institusi [17]. Studi lain menegaskan bahwa akreditasi dapat memengaruhi kinerja perguruan tinggi melalui mediasi *quality culture*, sehingga keberhasilan SPME tidak cukup dilihat dari perolehan status akreditasi, tetapi dari internalisasi mutu dalam perilaku organisasi [18]. Dalam konteks Indonesia, integrasi standar BAN-PT dengan pendekatan pengukuran kualitas layanan juga menunjukkan bahwa pemenuhan standar akreditasi perlu disertai pembacaan terhadap pengalaman pemangku kepentingan dan kesenjangan layanan akademik [19]. Sementara itu, digitalisasi penjaminan mutu membuka peluang penguatan data, transparansi, dan keterlacakan proses evaluasi, tetapi tetap memerlukan desain tata kelola yang menjamin bahwa data digunakan untuk pengambilan keputusan, bukan sekadar dokumentasi administratif [20], [21].

Berdasarkan telaah tersebut, kesenjangan penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga dimensi. Pertama, secara konseptual, belum banyak model yang secara eksplisit mengintegrasikan SPME, *Total Quality Management*, *quality culture*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai satu kerangka evaluatif. Kedua, secara metodologis, kajian akreditasi PTKI masih sering berhenti pada deskripsi regulatif atau kepatuhan dokumen, belum sampai pada sintesis tematik yang menghubungkan standar, budaya mutu, dan nilai kelembagaan Islam. Ketiga, secara kontekstual, PTKI memiliki mandat akademik sekaligus mandat moral-keislaman, sehingga evaluasi eksternal tidak memadai apabila hanya dibaca sebagai pemenuhan indikator administratif. Hasil analisis awal terhadap dokumen regulatif dan literatur menunjukkan bahwa praktik akreditasi pada sebagian institusi masih berisiko *compliance-oriented*, episodik menjelang asesmen, dan belum sepenuhnya membentuk *quality culture* yang berkelanjutan [22], [23]. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan rekonstruksi evaluasi SPME PTKI berbasis integrasi TQM dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi evaluasi SPME PTKI melalui akreditasi BAN-PT dan LAM; (2) mengidentifikasi kecenderungan *outcome-based accreditation* dan *compliance-oriented practice* dalam praktik akreditasi; serta (3) merumuskan arah transformasi akreditasi menuju *institutional excellence* berbasis keberlanjutan kemaslahatan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis dokumen dan kajian literatur terarah. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian bukan perilaku individu melalui survei atau eksperimen, melainkan konstruksi konseptual, regulatif, dan normatif tentang evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Analisis dokumen digunakan untuk menelaah regulasi, instrumen akreditasi, dan pedoman mutu PTKI, sedangkan kajian literatur digunakan untuk membangun dialog teoritis antara *quality assurance*, *Total Quality Management*, *quality culture*, akreditasi, *digital quality assurance*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan desain ini, penelitian tidak mengklaim generalisasi statistik, tetapi menghasilkan sintesis konseptual yang dapat ditelusuri melalui korpus dokumen dan literatur yang digunakan.

Desain Penelitian

Desain penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan orientasi sintesis tematik. Analisis dilakukan melalui tiga lapis pembacaan. Pertama, pembacaan regulatif terhadap kebijakan dan instrumen akreditasi untuk mengidentifikasi orientasi evaluasi, kriteria, dan relasi SPMI-SPME. Kedua, pembacaan teoretis terhadap literatur TQM, *quality assurance*, dan *quality culture* untuk menemukan prinsip *continuous improvement*, *evidence-based evaluation*, *stakeholder orientation*, dan *institutional learning*. Ketiga, pembacaan normatif terhadap literatur *maqāṣid* untuk merumuskan hubungan antara standar mutu dan tujuan kemaslahatan. Ketiga lapis analisis tersebut disintesis menjadi model rekonstruktif yang menjelaskan perubahan dari kepatuhan administratif menuju *value-based continuous improvement*.

Sumber Data dan Korpus Dokumen

Sumber data penelitian terdiri atas dokumen regulatif, instrumen akreditasi, pedoman mutu PTKI, literatur teori utama, dan artikel ilmiah yang relevan. Korpus dipilih secara purposive

dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung sumber terhadap SPME, SPMI, akreditasi BAN-PT/LAM, TQM, *quality culture*, *digital quality assurance*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Korpus utama terdiri atas 31 sumber, yaitu 5 dokumen regulatif dan pedoman, 7 literatur teori/fondasi konseptual, serta 19 artikel ilmiah dan kajian mutakhir. Sumber klasik seperti Deming, Juran, Al-Ghazālī, dan Al-Shāṭibī dipertahankan sebagai *foundational theory*, sedangkan literatur 2020–2026 digunakan untuk memperkuat konteks mutakhir penjaminan mutu, akreditasi, dan budaya mutu.

Tabel 1. Korpus dokumen dan fungsi analisis

Kategori sumber	Jumlah	Contoh sumber	Fungsi analisis
Dokumen regulatif dan pedoman	5	Regulasi penjaminan mutu, instrumen akreditasi, pedoman SPMI PTKI	Menelaah dasar formal SPME, SPMI, dan akreditasi PTKI
Literatur teori/fondasi konseptual	7	TQM, PDCA, quality planning, maqāṣid klasik dan kontemporer	Membangun kerangka teoretis dan normatif
Artikel ilmiah dan kajian mutakhir	19	Quality assurance, accreditation, quality culture, digital QA, dan SDG 4	Membandingkan temuan konseptual dengan studi relevan
Total korpus	31	Dokumen resmi, buku, dan artikel ilmiah	Dasar sintesis rekonstruktif SPME PTKI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bersifat konseptual pada konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Ilustrasi data akreditasi beberapa PTKI di Provinsi Lampung digunakan bukan sebagai sampel empiris nasional, melainkan sebagai contoh terbatas untuk memperlihatkan variasi capaian akreditasi dan potensi ketidakmerataan *institutional excellence*. Analisis disusun dalam konteks perkembangan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi hingga tahun 2026. Karena itu, pembacaan terhadap dokumen regulatif memperhatikan perkembangan dari kerangka akreditasi sebelumnya menuju pengaturan penjaminan mutu yang lebih menekankan keberlanjutan, akuntabilitas, integrasi data, dan hubungan SPMI-SPME.

Prosedur Penelitian dan Instrumen

Prosedur penelitian dilakukan melalui lima tahap. Tahap pertama adalah identifikasi dokumen inti melalui penelusuran regulasi, instrumen akreditasi, pedoman SPMI PTKI, dan literatur akademik. Tahap kedua adalah seleksi dokumen berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Tahap ketiga adalah ekstraksi konsep kunci, seperti *outcome-based accreditation*, *evidence-based evaluation*, *compliance-oriented practice*, *quality culture*, *continuous improvement*, *digital quality assurance*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tahap keempat adalah pengodean tematik terhadap kategori evaluasi, orientasi mutu, budaya mutu, integritas data, dan nilai maqāṣid. Tahap kelima adalah sintesis konseptual untuk menyusun arah rekonstruksi SPME PTKI. Instrumen penelitian berupa matriks analisis dokumen yang memuat kolom sumber, jenis dokumen, konsep utama, relevansi terhadap SPME, relevansi terhadap TQM, relevansi terhadap maqāṣid, dan implikasi rekonstruktif.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria seleksi ditetapkan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus rekonstruksi evaluasi SPME PTKI. Sumber regulatif dipilih apabila memiliki keterkaitan langsung dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi, akreditasi, atau PTKI. Sumber ilmiah dipilih apabila membahas *quality assurance*, *accreditation*, TQM, *quality culture*, *digital quality assurance*, atau *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks tata kelola pendidikan dan kelembagaan.

Tabel 2. Kriteria inklusi dan eksklusi dokumen

Aspek	Kriteria inklusi	Kriteria eksklusi
Jenis sumber	Regulasi resmi, instrumen akreditasi, pedoman PTKI, buku teori utama, dan artikel ilmiah relevan	Opini populer, sumber tanpa identitas penerbit, dan dokumen yang tidak terkait mutu pendidikan tinggi
Keterkaitan topik	Membahas SPME/SPMI, akreditasi, TQM, <i>quality culture</i> , <i>digital QA</i> , <i>maqāṣid</i> , atau PTKI	Membahas pendidikan secara umum tanpa kaitan dengan penjaminan mutu atau tata kelola
Rentang waktu	Literatur mutakhir 2020–2026 serta teori klasik/fondasional yang masih menjadi rujukan utama	Literatur lama yang tidak menjadi teori dasar dan tidak relevan dengan fokus kajian
Kualitas sumber	Artikel jurnal, buku akademik, dokumen resmi, atau sumber dengan metadata bibliografis jelas	Sumber dengan metadata tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan *thematic synthesis* dan komparasi teoritis. Proses analisis dilakukan melalui *open coding* untuk mengidentifikasi istilah dan gagasan utama, *grouping codes* untuk mengelompokkan kode yang memiliki kedekatan makna, *theme development* untuk membangun tema utama, *theoretical comparison* untuk membandingkan logika akreditasi nasional dengan prinsip TQM dan *maqāṣid*, serta *synthesis* untuk merumuskan model rekonstruktif. Tema akhir yang digunakan dalam hasil meliputi *outcome-based accreditation*, *compliance-oriented practice*, kesenjangan *quality culture*, dan integrasi standar mutu dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis tidak menggunakan perangkat statistik karena data bersifat tekstual dan normatif, tetapi prinsip audit trail diterapkan melalui penelusuran eksplisit antara dokumen, kode, tema, dan kesimpulan.

Keabsahan Data

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, audit trail, dan konsistensi interpretatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dokumen regulatif, instrumen akreditasi, pedoman mutu PTKI, serta literatur ilmiah nasional dan internasional. Audit trail dilakukan dengan menautkan sumber, kode, tema, dan simpulan dalam matriks analisis. Konsistensi interpretatif dijaga dengan memastikan bahwa setiap klaim rekonstruktif memiliki dasar pada dokumen atau literatur yang dianalisis, bukan hanya pada asumsi normatif penulis.

Validasi Konseptual dan Implikasi Model

Validasi konseptual dilakukan melalui triangulasi sumber dan pemeriksaan konsistensi logis antarkonsep. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan regulasi penjaminan mutu, instrumen akreditasi, pedoman mutu PTKI, literatur TQM, literatur *quality assurance*, dan

literatur maqāsid. Kredibilitas dijaga melalui keterlacakan sumber dan kesesuaian antara tema dengan dokumen yang dianalisis. *Dependability* dijaga melalui tahapan analisis yang eksplisit, sedangkan *confirmability* diperkuat dengan penggunaan matriks analisis dokumen agar hubungan antara data, interpretasi, dan model dapat ditinjau kembali. Karena penelitian ini bukan studi intervensi, dampak tidak diukur secara kausal, tetapi diposisikan sebagai implikasi konseptual model rekonstruktif terhadap relasi SPMI-SPME, budaya mutu, dan *institutional excellence* PTKI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis menunjukkan empat temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, instrumen akreditasi pendidikan tinggi telah bergerak menuju outcome-based accreditation melalui penekanan pada luaran, capaian tridharma, tata kelola, dan bukti kinerja. Kedua, praktik akreditasi di tingkat institusi masih berisiko dipersempit menjadi pemenuhan dokumen dan persiapan periodik menjelang asesmen. Ketiga, terdapat kesenjangan quality culture karena penjaminan mutu belum selalu dipahami sebagai komitmen kolektif seluruh sivitas akademika. Keempat, dimensi akreditasi PTKI dapat dipertautkan dengan maqāsid al-syarī'ah, sehingga mutu tidak hanya dibaca sebagai kesesuaian administratif, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap nilai, ilmu, keselamatan, amanah sumber daya, dan kualitas generasi. Ringkasan matriks tematik hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks tematik hasil analisis dokumen dan literatur

Tema temuan	Basis sumber	Bukti/indikasi utama	Implikasi terhadap SPME PTKI
<i>Outcome-based accreditation</i>	Instrumen akreditasi, regulasi, literatur QA	Penekanan pada luaran, capaian tridharma, tata kelola, dan bukti kinerja	SPME perlu berbasis data capaian dan tindak lanjut mutu
<i>Compliance-oriented practice</i>	Literatur akreditasi dan <i>quality complacency</i>	Akreditasi berisiko menjadi persiapan dokumen menjelang asesmen	SPME harus terhubung dengan siklus PPEPP dan AMI
<i>Quality culture gap</i>	Literatur <i>quality culture</i> dan TQM	Mutu sering dipahami sebagai tugas unit penjaminan mutu, bukan tanggung jawab kolektif	Diperlukan kepemimpinan, partisipasi, dan pembelajaran organisasi
<i>Maqāsid-based quality</i>	Literatur <i>maqāsid</i> dan manajemen pendidikan Islam	Standar mutu dapat dibaca melalui <i>hifz al-dīn</i> , <i>al-'aql</i> , <i>al-nafs</i> , <i>al-māl</i> , dan <i>al-nasl</i>	Akreditasi perlu memiliki orientasi etik dan kemaslahatan publik

Outcome-Based Accreditation

Temuan pertama menunjukkan bahwa kerangka akreditasi telah mengarah pada evaluasi berbasis capaian. Sembilan kriteria IAPT 3.0 tidak hanya menanyakan keberadaan dokumen, tetapi juga menilai keterhubungan visi, tata kelola, sumber daya, proses tridharma, dan luaran institusi [10]. Arah ini menunjukkan bahwa SPME telah bergerak dari pemeriksaan input administratif menuju pembacaan atas kinerja institusi. Akan tetapi, orientasi outcome-based

hanya akan bermakna apabila data capaian benar-benar digunakan untuk evaluasi diri, tindak lanjut, dan pengambilan keputusan internal.

Dominasi Compliance-Oriented Practice

Temuan kedua memperlihatkan adanya ketegangan antara orientasi instrumen dan praktik kelembagaan. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa sebagian institusi dapat mengalami quality complacency, yaitu kecenderungan merasa cukup setelah memperoleh status akreditasi tertentu, sehingga siklus perbaikan tidak selalu berjalan konsisten [22]. Dalam konteks PTKI, gejala ini dapat muncul dalam bentuk persiapan intensif menjelang asesmen, penataan dokumen secara reaktif, dan lemahnya penggunaan hasil asesmen untuk pembelajaran organisasi. Dengan demikian, compliance-oriented practice bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan budaya dan kepemimpinan mutu.

Kesenjangan Quality Culture

Temuan ketiga berkaitan dengan budaya mutu. Penjaminan mutu sering kali dipahami sebagai tugas lembaga penjaminan mutu, gugus kendali mutu, atau tim akreditasi, bukan sebagai tanggung jawab seluruh unit akademik dan administratif. Padahal quality culture menuntut integrasi antara struktur formal dan komitmen kultural [5]. Jika akreditasi hanya dikerjakan oleh tim teknis, maka data mutu tidak menjadi bahasa bersama dalam rapat pimpinan, pengembangan kurikulum, evaluasi dosen, dan layanan mahasiswa. Kesenjangan ini memperlemah hubungan SPMI dan SPME karena hasil akreditasi tidak otomatis menjadi masukan untuk perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan pembelajaran organisasi.

Variasi Capaian Akreditasi PTKI di Lampung

Data ilustratif PTKI di Provinsi Lampung menunjukkan variasi capaian akreditasi. Variasi tersebut penting dibaca secara hati-hati karena status akreditasi tidak hanya menunjukkan hasil asesmen, tetapi juga mencerminkan kesiapan sistem mutu internal, konsistensi tata kelola, kinerja tridharma, dan kemampuan institusi menyediakan bukti. Data ini tidak dimaksudkan untuk menilai mutu komprehensif tiap institusi, melainkan sebagai konteks empiris terbatas untuk menunjukkan bahwa capaian institutional excellence belum merata. Status “Aktif” pada sebagian data dipertahankan sesuai informasi yang dicantumkan penulis dan perlu diverifikasi kembali melalui sumber resmi BAN-PT/PDDikti sebelum pengiriman akhir naskah.

Tabel 4. Data ilustratif akreditasi PTKI di Provinsi Lampung

Nama Perguruan Tinggi	Status Akreditasi	Masa Berlaku
UIN Raden Intan Lampung	Unggul	s.d. 25 Juni 2029
IAIN Metro	B	s.d. 20 Januari 2027
Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)	Baik Sekali	Aktif
Universitas Islam An-Nur Lampung	Baik	Aktif
STIT Darul Fattah Bandar Lampung	Baik	s.d. 2026

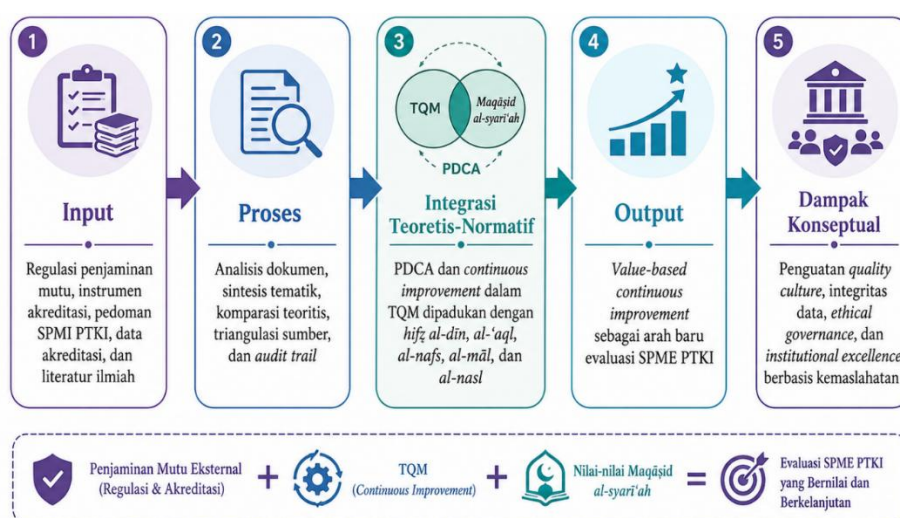
Sumber: diolah dari makalah sumber dan data akreditasi yang dicantumkan penulis.

Korelasi Standar Mutu dan Maqāṣid

Temuan keempat menunjukkan bahwa dimensi akreditasi dapat dibaca melalui maqāṣid al-syarī'ah. Keterhubungan ini tidak dimaksudkan untuk mengganti standar nasional, tetapi memperluas fondasi etik dan filosofisnya. Dalam PTKI, tata nilai, kurikulum, riset, lingkungan kampus, keuangan, dan lulusan tidak hanya merupakan objek penilaian administratif, melainkan juga sarana pemeliharaan maslahat. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka nilai yang mengarahkan standar akreditasi agar tidak kehilangan orientasi kemanusiaan, keilmuan, integritas, dan keberlanjutan. Operasionalisasi awal hubungan tersebut disajikan pada Table 5.

Tabel 5. Korelasi dimensi akreditasi, kriteria mutu, dan *maqāṣid al-syarī'ah*

<i>Maqāṣid</i>	Dimensi Akreditasi	Makna Rekonstruktif	Kriteria Akreditasi Terkait
<i>Hifẓ al-Dīn</i>	Integritas dan tata nilai	Akreditasi memastikan amanah, etika, dan orientasi nilai kelembagaan.	Visi, misi, tata pamong, kerja sama, dan tata nilai institusi
<i>Hifẓ al-'Aql</i>	Kurikulum dan penelitian	Mutu akademik diarahkan pada pengembangan ilmu, nalar kritis, dan inovasi.	Pendidikan, penelitian, luaran akademik, dan pengembangan kurikulum
<i>Hifẓ al-Nafs</i>	Lingkungan kampus	Sistem mutu menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan layanan yang manusiawi.	Mahasiswa, layanan akademik, sarana-prasarana, dan lingkungan kampus
<i>Hifẓ al-Māl</i>	Tata kelola keuangan	Akuntabilitas sumber daya mencegah pemborosan dan memperkuat keberlanjutan.	Kuangan, sarana-prasarana, audit, dan akuntabilitas sumber daya
<i>Hifẓ al-Nasl</i>	Kualitas lulusan	Akreditasi menjaga mutu generasi melalui kompetensi, karakter, dan kontribusi sosial.	Luaran dan capaian tridharma, lulusan, dampak sosial, dan keberlanjutan



Gambar 1. Model rekonstruksi evaluasi SPME PTKI berbasis TQM dan maqāṣid al-syarī'ah

Pembahasan

Pembahasan ini menegaskan bahwa rekonstruksi evaluasi SPME PTKI perlu ditempatkan sebagai proses perubahan dari kepatuhan administratif menuju perbaikan berkelanjutan yang bernilai. Temuan penelitian ini sejalan dengan Rosa dan Amaral yang menempatkan penjaminan mutu sebagai titik temu antara akuntabilitas eksternal dan peningkatan internal [16]. Namun, artikel ini memperluas pandangan tersebut dalam konteks PTKI dengan menambahkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai fondasi etik, sehingga akreditasi tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan indikator, tetapi juga sebagai mekanisme penjagaan amanah, integritas, pengembangan ilmu, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, perbedaan utama artikel ini dari kajian quality assurance umum terletak pada upayanya mengaitkan standar akreditasi dengan nilai kelembagaan Islam secara sistematis.

Temuan tentang pergeseran menuju outcome-based dan evidence-based accreditation juga sejalan dengan Kumar dkk. yang menunjukkan bahwa akreditasi berkontribusi terhadap mutu pendidikan dan pencapaian SDG 4, tetapi masih memerlukan kajian yang menjelaskan hubungan antara akreditasi, *quality assurance*, dan dampak kelembagaan [17]. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan menempatkan outcome akreditasi bukan hanya sebagai capaian administratif, melainkan sebagai dasar refleksi institusi untuk memperbaiki kurikulum, tata kelola, layanan mahasiswa, penelitian, pengabdian, dan luaran tridharma. Apabila dibandingkan dengan UNESCO yang menekankan pentingnya pendidikan tinggi bermutu, inklusif, dan berkelanjutan [24], rekonstruksi yang ditawarkan artikel ini menunjukkan bahwa mutu PTKI perlu dihubungkan dengan keberlanjutan kemaslahatan, bukan semata dengan status akreditasi.

Kecenderungan *compliance-oriented practice* yang ditemukan dalam artikel ini memperkuat hasil Kumar, Gawande, dan Raibagkar tentang *quality complacency*, yaitu kecenderungan institusi merasa cukup setelah memperoleh status akreditasi sehingga siklus peningkatan mutu tidak selalu berjalan konsisten [22]. Temuan ini juga beririsan dengan Stensaker dkk. yang menunjukkan bahwa dampak *external quality assurance* sangat bergantung pada kemampuan institusi menerjemahkan hasil evaluasi eksternal ke dalam perubahan internal [25]. Dalam konteks PTKI, hal ini berarti rekomendasi asesor tidak boleh berhenti sebagai arsip reakreditasi, tetapi harus masuk ke dalam siklus PPEPP, audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, penganggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja unit. Dengan cara tersebut, akreditasi dapat berfungsi sebagai perangkat pembelajaran organisasi, bukan sekadar agenda periodik menjelang asesmen.

Dari perspektif TQM, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Sallis bahwa mutu pendidikan memerlukan kepemimpinan, orientasi pemangku kepentingan, keterlibatan seluruh unsur organisasi, dan perbaikan berkelanjutan [7]. Gagasan ini selaras dengan Deming dan Juran yang menolak ketergantungan pada inspeksi akhir serta menempatkan perbaikan sistem sebagai inti manajemen mutu [8], [9]. Jika dibandingkan dengan Asiyai yang menekankan praktik terbaik *quality assurance* dalam administrasi pendidikan tinggi [26] dan Lucander serta Christersson yang menekankan keterlibatan aktor akademik dalam quality development [27], artikel ini menambahkan bahwa PTKI memerlukan sistem mutu yang tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga bermakna secara etik. Oleh karena itu, standar teknis seperti tata pamong, kurikulum, SDM, keuangan, sarana, penelitian, pengabdian, dan luaran harus dibaca

sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan layanan, kejujuran data, akuntabilitas sumber daya, dan kebermanfaatan lulusan.

Pembahasan tentang *quality culture* menunjukkan bahwa akreditasi tidak akan menghasilkan perubahan substantif apabila mutu hanya dipahami sebagai pekerjaan lembaga penjaminan mutu atau tim akreditasi. Bendermacher dkk. menegaskan bahwa *quality culture* terbentuk melalui hubungan antara struktur formal dan komitmen kultural [5]. Temuan ini diperkuat oleh Iqbal, Taib, dan Razalli yang menunjukkan bahwa *quality culture* dapat memediasi pengaruh akreditasi terhadap kinerja perguruan tinggi [18], serta Savickienė yang menempatkan *quality culture* sebagai proses *continuous improvement* dan kepemilikan bersama terhadap mutu [28]. Dibandingkan dengan studi-studi tersebut, artikel ini memberikan penajaman pada konteks PTKI dengan menempatkan amanah, *muhāsabah*, *itqan*, dan ihsan sebagai nilai yang memperkuat budaya mutu. Nilai-nilai tersebut penting agar penjaminan mutu tidak berubah menjadi formalitas dokumen, manipulasi bukti, atau kerja administratif yang hanya aktif menjelang asesmen.

Digitalisasi penjaminan mutu juga menjadi unsur penting dalam rekonstruksi SPME PTKI. Schellekens dkk. menunjukkan bahwa aplikasi digital dapat memperkuat *quality assurance* melalui keterlacakan data dan pengelolaan informasi mutu [20], sedangkan OECD menekankan bahwa kualitas pendidikan tinggi digital memerlukan tata kelola, data, dan mekanisme evaluasi yang jelas [21]. Dalam konteks Indonesia, Pratiwi dan Kusumah menunjukkan bahwa integrasi standar BAN-PT dengan pendekatan pengukuran kualitas layanan dapat membantu perguruan tinggi membaca kesenjangan antara standar formal dan pengalaman pemangku kepentingan [19]. Temuan tersebut sejalan dengan artikel ini, tetapi artikel ini menambahkan bahwa digitalisasi mutu harus dihubungkan dengan prinsip *maqāṣid* agar data tidak hanya menjadi repositori administratif. Data mutu perlu digunakan untuk keputusan akademik, evaluasi kurikulum, pengembangan dosen, perbaikan layanan mahasiswa, transparansi keuangan, dan penguatan keselamatan serta kesejahteraan kampus.

Integrasi *maqāṣid al-syarī‘ah* memperluas makna akreditasi dari *institutional adequacy* menuju *institutional excellence*. Al-Ghazālī, Al-Shāṭibī, dan Auda menempatkan *maqāṣid* sebagai kerangka perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan generasi [13]-[15]. Dalam artikel ini, kerangka tersebut dioperasionalkan melalui hubungan antara *hifẓ al-dīn* dengan integritas tata nilai, *hifẓ al-‘aql* dengan kurikulum dan penelitian, *hifẓ al-nafs* dengan lingkungan kampus yang aman, *hifẓ al-māl* dengan akuntabilitas sumber daya, serta *hifẓ al-nasl* dengan kualitas lulusan dan kontribusi sosial. Jika dibandingkan dengan Oware yang menawarkan model audit institusional untuk penjaminan mutu [29], artikel ini tidak hanya menekankan audit sebagai perangkat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme reflektif untuk memastikan bahwa mutu pendidikan tinggi Islam menghasilkan maslahat yang dapat ditelusuri secara akademik dan kelembagaan.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada penyusunan kerangka *value-based continuous improvement* yang menghubungkan SPME, TQM, *quality culture*, *digital quality assurance*, dan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam satu model rekonstruktif. Meskipun demikian, integrasi *maqāṣid* ke dalam akreditasi perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi indikator simbolik atau subjektif. Risiko seperti tumpang tindih indikator, perbedaan tafsir nilai, dan kesulitan pengukuran harus diantisipasi melalui indikator yang dapat diverifikasi, audit trail, triangulasi dokumen, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Keterbatasan artikel

ini terletak pada penggunaan analisis dokumen dan literatur, belum melibatkan wawancara dengan pengelola mutu, asesor, dosen, mahasiswa, atau pimpinan PTKI, serta belum menggunakan protokol *systematic review*. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menguji model ini melalui studi kasus multiperguruan tinggi agar validitas konseptual, operasional, dan empirisnya dapat diperkuat.

KESIMPULAN

Evaluasi SPME PTKI melalui akreditasi BAN-PT dan LAM telah bergerak menuju orientasi outcome-based dan evidence-based. Namun, praktik kelembagaan masih berisiko terjebak pada *compliance-oriented accreditation*, persiapan episodik menjelang asesmen, dan budaya administratif yang belum sepenuhnya berubah menjadi *quality culture*. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi TQM dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat merekonstruksi akreditasi sebagai *value-based continuous improvement*, yaitu proses evaluasi eksternal yang tidak hanya menguji kesesuaian dokumen, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan, integritas data, tata kelola etis, dan kemaslahatan institusional. Kontribusi utama artikel ini adalah model rekonstruksi SPME PTKI yang menghubungkan standar akreditasi, siklus PPEPP, prinsip TQM, quality culture, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu kerangka evaluatif. Dengan kerangka tersebut, PTKI diarahkan untuk bergerak dari *institutional adequacy* menuju institutional excellence berbasis keberlanjutan kemaslahatan. Implikasi praktisnya, hasil akreditasi perlu diintegrasikan ke dalam audit mutu internal, rapat tinjauan manajemen, rencana strategis, penganggaran, pengembangan SDM, dan sistem informasi mutu. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model ini melalui studi kasus komparatif pada beberapa PTKI dengan melibatkan pimpinan, pengelola mutu, dosen, mahasiswa, asesor, dan dokumen akreditasi agar validitas konseptualnya dapat diperkuat secara empiris.

INFORMASI PENULIS

Penulis Koresponden

Merita Diana – Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: meritadiana@gmail.com

Penulis

Merita Diana – Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: meritadiana@gmail.com

Subandi – Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: subandi@radenintan.ac.id

Deden Makbuloh – Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: dedenmakbuloh@radenintan.ac.id

Ahmad Fauzan – Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);
Email: ahmad.fauzana@radenintan.ac.id

KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

DAFTAR PUSTAKA

- [1] European Association for Quality Assurance in Higher Education, *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*. Brussels, Belgium: ENQA, ESU, EUA, EURASHE, 2015.
- [2] L. Harvey and D. Green, "Defining quality," *Assessment & Evaluation in Higher Education*, vol. 18, no. 1, pp. 9–34, 1993. <https://doi.org/10.1080/0260293930180102>
- [3] B. Stensaker, "Outcomes of quality assurance: A discussion of knowledge, methodology and validity," *Quality in Higher Education*, vol. 14, no. 1, pp. 3–13, 2008. <https://doi.org/10.1080/13538320802011532>
- [4] N. Elassy, "The concepts of quality, quality assurance and quality enhancement," *Quality Assurance in Education*, vol. 23, no. 3, pp. 250–261, 2015. <https://doi.org/10.1108/QAE-11-2012-0046>
- [5] G. W. G. Bendermacher, M. G. A. Oude Egbrink, I. H. A. P. Wolfhagen, and D. H. J. M. Dolmans, "Unravelling quality culture in higher education: A realist review," *Higher Education*, vol. 73, no. 1, pp. 39–60, 2017. <https://doi.org/10.1007/s10734-015-9979-2>
- [6] T. Leiber, B. Stensaker, and L. Harvey, "Impact evaluation of quality assurance in higher education: Methodology and causal designs," *Quality in Higher Education*, vol. 21, no. 3, pp. 288–311, 2015. <https://doi.org/10.1080/13538322.2015.1111007>
- [7] E. Sallis, *Total Quality Management in Education*, 3rd ed. London, UK: Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9780203417010>
- [8] W. E. Deming, *Out of the Crisis*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [9] J. M. Juran, *Juran's Quality Handbook*, 5th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1999.
- [10] BAN-PT, *Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0: Pedoman Penilaian*. Jakarta, Indonesia: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2019.
- [11] Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta, Indonesia, 2025.
- [12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2019.
- [13] Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā min 'ilm al-uṣūl*. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- [14] A. I. Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah*. Beirut, Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- [15] J. Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London, UK: International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- [16] M. J. Rosa and A. Amaral, Eds., *Quality Assurance in Higher Education: Contemporary Debates*. London, UK: Palgrave Macmillan, 2014. <https://doi.org/10.1057/9781137374639>
- [17] A. Kumar, J. Paliwal, M. Singh, V. Pendse, R. Gade, M. Palav, and S. Raibagkar, "Focused literature review on accreditation and quality assurance: Insights and future research agenda," *Quality Assurance in Education*, vol. 33, no. 3, pp. 376–392, 2025. <https://doi.org/10.1108/QAE-08-2024-0170>

- [18] S. Iqbal, C. A. B. Taib, and M. R. Razalli, "The effect of accreditation on higher education performance through quality culture mediation: The perceptions of administrative and quality managers," *The TQM Journal*, vol. 36, no. 2, pp. 572–592, 2024. <https://doi.org/10.1108/TQM-11-2022-0322>
- [19] M. Pratiwi and L. H. Kusumah, "Enhancing the accreditation of Indonesian private universities through the integration of EduQual and accreditation standards of the BAN-PT," *REID (Research and Evaluation in Education)*, vol. 10, no. 2, pp. 227–243, 2024. <https://doi.org/10.21831/reid.v10i2.76406>
- [20] L. H. Schellekens, M. F. van der Schaaf, C. P. M. van der Vleuten, F. J. Prins, S. Wools, and H. G. J. Bok, "Developing a digital application for quality assurance of assessment programmes in higher education," *Quality Assurance in Education*, vol. 31, no. 2, pp. 346–360, 2023. <https://doi.org/10.1108/QAE-03-2022-0066>
- [21] OECD, *Ensuring Quality Digital Higher Education in Hungary*. Paris, France: OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/5f44fd6f-en>
- [22] A. Kumar, A. Gawande, and S. S. Raibagkar, "Quality complacency in Indian higher education institutions between the second and third cycles of accreditation," *Quality Assurance in Education*, vol. 30, no. 4, pp. 431–445, 2022. <https://doi.org/10.1108/QAE-01-2022-0019>
- [23] B. Stensaker, "Quality assurance and the battle for legitimacy: Discourses, disputes and dependencies," *Higher Education Quarterly*, vol. 75, no. 1, pp. 39–53, 2021. <https://doi.org/10.1111/hequ.12264>
- [24] UNESCO, *Progress towards SDG 4 in Higher Education: Challenges and Opportunities*. Paris, France: UNESCO, 2023.
- [25] B. Stensaker, L. Langfeldt, L. Harvey, J. Huisman, and D. F. Westerheijden, "An in-depth study on the impact of external quality assurance," *Assessment & Evaluation in Higher Education*, vol. 36, no. 4, pp. 465–478, 2011. <https://doi.org/10.1080/02602930903432074>
- [26] R. I. Asiyai, "Best practices for quality assurance in higher education: Implications for educational administration," *International Journal of Leadership in Education*, vol. 25, no. 5, pp. 843–854, 2022. <https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1710569>
- [27] H. Lucander and C. Christersson, "Engagement for quality development in higher education: A process for quality assurance of assessment," *Quality in Higher Education*, vol. 26, no. 2, pp. 135–155, 2020. <https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1761008>
- [28] I. Savickienė, "Analyzing quality culture in higher education: A screening model for continuous improvement," *Frontiers in Education*, vol. 11, 2026. <https://doi.org/10.3389/educ.2026.1820196>
- [29] E. N. Oware, "Standardized framework for institutional audit for quality in higher education: A conceptual model," *Frontiers in Education*, vol. 10, 2025. <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1673932>